

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSIAPAN PEMEKARAN
NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
KABUPATEN SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Hesti Permata Yanda

NPM: 2210012111043

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg No:13/Skripsi/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

Reg No: 13/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Hesti Permata Yanda

Nomor : 2210012111043

Bagian : Hukum Tata Negara

**Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Daerah Dalam Persiapan Pemekaran
Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti
Kabupaten Solok**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Helmi Chandra SY, S.H.,M.H (Pembimbing)



**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSIAPAN PEMEKARAN
NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
KABUPATEN SOLOK**

**Hesti Permata Yanda¹, Helmi Chandra SY, S.H., M.H.¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : hestypemata671@gmail.com**

ABSTRACT

Nagari expansion is a government effort to enhance the quality of public services, maximize community needs, and shorten the government's span of control. Pursuant to the Permendagri Number 1 of 2017 concerning Village Arrangement. *Nagari* Sungai Nanam was expanded into 4 *nagari* areas but there are still obstacles for example such as minimal infrastructure, inadequate facilities, and a limited number of administrative staff. The research problems in this study are: 1) What is the role of the Regional Government in preparing for the expansion of Nagari Sungai Nanam, Lembah Gumanti District, Solok Regency? 2) What are the obstacles faced by the Regional Government in preparing for the expansion? 3) What are the efforts taken to overcome these obstacles? This study employs a socio-legal method. Primary and secondary data sources were obtained through document studies and interviews, subsequently analyzed using qualitative methods. The research results indicate: 1) The role of the Solok Regency Government, through the Department of Community Empowerment and Nagari (DPMN), includes providing guidance, supervision, facilitation, and encouragement for preparatory *nagari* to achieve definitive status. Meanwhile, the Nagari Government acts as the executor at the local level. 2) The obstacles faced do not significantly originate from regional government institutions but rather occur at the *nagari* government level as the direct implementers, including: (a) limited human resources, (b) unavailability of budget allocations from the parent *nagari*, and (c) lack of adequate facilities and infrastructure. 3) Efforts to overcome these issues include: (a) providing administrative solutions, (b) seeking Special Financial Assistance (BKK), and (c) optimizing community self-help

Keywords: Nagari Expansion, Regional Government, Nagari Government

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemekaran adalah dampak dari fenomena otonomi daerah, proses pemekaran wilayah administrasi pemerintahan berlangsung dari

berbagai tingkatan dan akhirnya hingga ke level nagari di budaya Minang Kabau, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa dijelaskan pemekaran sebuah wilayah harus memenuhi beberapa persyaratan salah

satunya untuk wilayah Sumatera paling sedikit terdiri dari 4.000 jiwa dan 800 kepala keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor wali nagari Sungai Nanam jumlah penduduk pada tahun 2025 sebanyak 24.445.¹

Nagari Sungai Nanam salah satu nagari yang dalam persiapan pemekaran. Pada tahun 2024 perencanaan tersebut di realisasikan melalui pembentukan 4 nagari yaitu Nagari Sungai Nanam induk, Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat, Nagari Persiapan Sungai Nanam Timur, dan Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan. Meskipun pemekaran telah di laksanakan, situasi dan kondisi infrastruktur pemerintahan di setiap nagari masih tergolong minim. Sementara itu, jabatan wali nagari belum sepenuhnya di isi secara defenitif dan masih di isi oleh Pejabat (PJ) Wali Nagari. Dengan banyaknya kendala pemerintah daerah mempunyai peran memastikan nagari yang akan dimekarkan tetap memberikan pelayanan yang baik. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH DAERAH**

DALAM PERSIAPAN PEMEKARAN NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari

¹ Dira Putri Lorenza, 2025, *Konflik Hukum Pada Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Di Bawah Umur Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten*

Sungai Nanam Kecamatan
Lembah Gumati Kabupaten
Solok

3. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer yaitu melalui wawancara dan Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Dokumen dan Wawancara. Setelah data diperoleh baik data primer ataupun data sekunder, kemudian dianalisis secara Kualitatif.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Persiapan Pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

1. Memberikan bimbingan dan pembinaan
2. Memberikan solusi terhadap berbagai kendala.

3. Mendorong nagari persiapan untuk memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan.

4. Memfasilitasi *Focus Group Discussion* (FGD) untuk persiapan pemekaran nagari.
5. Melakukan monitoring ke nagari yang akan dimekarkan.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

1. Keterbatasan sumber daya manusia
2. Tidak tersedia anggaran dana dari nagari induk
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

C. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

1. DPMN memberikan solusi dan Pemerintah nagari harus bekerja rangkap tugas sementara
2. DPMN mengupayakan perolehan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan pemerintah Nagari melakukan penggalangan dana secara mandiri

² Samiaji Saroso, 2021, *Penelitian Kualitatif*, PT

3. DPMN membuat regulasi dan pemerintah nagari memanfaatkan swadaya masyarakat sementara.

VI. PENUTUP

A. Simpulan

DPMN Kabupaten Solok berperan penting dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok melalui pemberian bimbingan, pembinaan, fasilitasi, dan dorongan kepada nagari persiapan menuju nagari defenitif. Kendala-kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, tidak tersedia anggaran dana dari nagari induk, kurangnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan meliputi memberikan solusi, upaya perolehan dana bantuan khusus (BKK), dan memanfaatkan swadaya masyarakat.

B. Saran

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pengalokasian anggaran operasional yang jelas dan berkelanjutan
3. Penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Samiaji Saroso, 2021, *Penelitian Kualitatif*, PT Kanisius, Depok.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Sumber lain

Dira Putri Lorenza, 2025, *Konflik Hukum Pada Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Di Bawah Umur Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, <https://repository.uinib.ac.id>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan ucapan terima kasih kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Perundang-Undangan